

**PENGARUH ANGKA MELEK HURUF TERHADAP KEMISKINAN DI
PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2008-2015**

*(Abid Muhtarom

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran No.53A Lamongan

Telp. (0322) 324706, Faks. (0322) 324706

Email : jpim.unisla@gmail.com

ABSTRAK

Membaca merupakan kegiatan atau hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya kegiatan membaca membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih pintar dan kreatif. Minat baca yang kurang menjadikan permasalahan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Sehingga banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik, karena kurang adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori, yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2015 (Husaini, 2008:5). Ditinjau dari sifat hubungan antara variabelnya, penelitian ini dirancang sebagai penelitian kausal dimana variabel yang satu dengan yang lain tidak sekedar dijelaskan hubungan dengan uji regresi linier sederhana, lebih dari itu akan didiskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan SPSS 20. Besarnya nilai korelasi / hubungan R yaitu 0,597. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori kuat. Melalui tabel ini juga di peroleh nilai R Square atas koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai AMH (Angka Melek Huruf) yang diperoleh adalah 35,7% memiliki pengaruh kontribusi sebesar 35,7% terhadap variabel Y yaitu kemiskinan dan 64,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel AMH (Angka Melek Huruf) (X). Berdasarkan tabel Anova, diperoleh nilai Sig. = 0,118 yang berarti > kriteria signifikan 0,05 (5%), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan artinya model regresi linier tidak memenuhi kriteria linieritas.

Kata Kunci: *Angka Melek Huruf dan Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Membaca merupakan kegiatan atau hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya kegiatan membaca membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih

pintar dan kreatif. Minat baca yang kurang menjadikan permasalahan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Adanya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan keinginan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dimana banyaknya masyarakat di sana yang belum bisa dalam membaca. Dari data BPS dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2008 angka melek huruf (AMH) sebesar 85,11 % dan pada tahun 2009 angka melek huruf (AMH) sebesar 87,25 terjadi peningkatan. Pada tahun 2010 angka melek huruf (AMH) sebesar 88,50 % nilai ini lebih besar dari tahun 2008-2009. Pada tahun 2011 angka melek huruf (AMH) sebesar 89,88 % sedangkan pada tahun 2012 angka melek huruf (AMH) sebesar turun menjadi 89,78 %. Penurunan 0,10% ini disebabkan karena adanya perubahan kurikulum dalam program pendidikan di Indonesia. Sehingga masyarakat banyak yang menunggu kepastian dari pemerintah. Pada tahun 2013 angka melek huruf (AMH) sebesar 90,99 dan pada tahun 2014 dan tahun 2015 secara berurutan angka melek huruf (AMH) sebesar 91,37% dan 93,14%.

Berdasarkan dari data BPS ini dapat diketahui bahwa banyak masyarakat Provinsi Jawa Timur yang kurang akan membaca dan melek huruf. Sehingga banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik, karena kurang adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan.

Maka dari itu peneliti membuat penelitian tentang “Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2015”

LANDASAN TEORI

1. Pendidikan

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur, adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

1.1. Rumah tangga yang tidak tercakup dalam Susenas adalah:

- a) Orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama ABRI (tangsia), dan asrama karyawan/mahasiswa.
- b) Orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, Panti Asuhan dan sebagainya.
- c) Sekelompok orang yang mondok dengan makan/indekos yang berjumlah 10 orang atau lebih.

1.2. Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya

bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian (tidak berniat pindah) kurang dari 6 bulan. Orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- 1.3. Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).
- 1.4. Bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/ sederajat) maupun non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Kementerian Agama (Kemenag), instansi lainnya negeri maupun swasta
- 1.5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

- 1.6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 1.7. Tidak/ belum pernah sekolah adalah tidak/ belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/ belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- 1.8. Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/ tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia

mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

- 1.9. Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.
- 1.10. Angka Partisipasi Sekolah (APS): proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut
- 1.11. Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.
- 1.12. Angka Partisipasi Kasar (APK) : Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut

2. Kemiskinan

2.1. Penduduk Miskin

3.1.1 Konsep :

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

3.1.2. Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

2.2. Garis Kemiskinan (GK)

3.2.1 Konsep:

- a) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- c) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili

oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

3.2.2 Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan : $GK = GKM + GKNM$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

$GKNM$ = Garis Kemiskinan Non Makan

1) Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference population) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori

perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana :

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

Dimana :

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK_j} \times 2100$$

Dimana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

- a. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data

Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

Dimana:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

2.3.Persentase Penduduk Miskin

3.3.1 Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

3.3.2 Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

a) Rumus Penghitungan :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah

garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

2.4.1. Konsep :

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

2.4.2. Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah

garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2.5. Indeks Keparahan Kemiskinan

2.5.1. Konsep

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.5.2. Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah

garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori, yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2015 (Husaini, 2008:5).

Ditinjau dari sifat hubungan antara variabelnya, penelitian ini dirancang sebagai penelitian

kausal dimana variabel yang satu dengan yang lain tidak sekedar dijelaskan hubungan dengan uji regresi linier sederhana, lebih dari itu akan didiskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan SPSS 20. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, secara hipotesis, diidentifikasi variabel yang akan diteliti, yaitu : Angka Melek Huruf dan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2015.

a. Metode Pendidikan

Indikator pendidikan bersumber dari data hasil Susenas Kor tahun 2008 - 2015. Susenas merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan dengan cakupan relatif luas. Susenas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963. Data yang dikumpulkan antara lain bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan persepsi masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Pada tahun 1992, sistim pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun indikator kesejahteraan rakyat (Kesra) yang terdapat dalam Modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam Kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Sejak itu, setiap tahun, dalam Susenas tersedia data yang dapat digunakan untuk memantau kesejahteraan masyarakat, merumuskan program pemerintah yang khusus ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan menganalisis dampak berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk.

Indikator sosial budaya bersumber dari Susenas modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Keterangan rinci dalam modul dikumpulkan secara bergiliran dalam kurun waktu tiga tahun. Modul Susenas dikelompokkan ke dalam 3 paket, sebagai berikut: (1) Modul Konsumsi/Pengeluaran dan Pendapatan Rumah Tangga, (2) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, serta (3) Modul Kesehatan dan Perumahan.

Susenas pertama kali dilakukan pada bulan Januari-Februari. Sejak tahun 2005 mengalami pergeseran waktu karena beberapa hal sebagai berikut:

- a) Perubahan bulan survei yang dimulai tahun anggaran yaitu Januari-Desember;
- b) Cuaca tidak kondusif seperti terjadi banjir, ombak besar dan sebagainya yang akan beresiko terhadap petugas, sehingga pelaksanaan dilakukan bulan Januari-Februari;
- c) Masa panen yang dapat mempengaruhi konsumsi/pendapatan rumah tangga, sehingga pelaksanaan survei dilakukan bulan Juni-Juli.

b. Metode kemiskinan

Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban

dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.

Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang

distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dapat diketahui data angka melek huruf dan angka kemiskinan dalam persen (%), sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

TABEL 1.
ANGKA MELEK HURUF DAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2008-2015

No	Uraian	Tahun ke- dalam persen (%)							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
1	Angka melek huruf	85,11	87,25	88,50	89,88	89,78	0,99	91,37	93,14
2	kemiskinan jawa timur	0,35	0,32	0,31	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, diolah

a. Angka Melek Huruf

Dari data diatas tabel D.1 dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2008 angka melek huruf (AMH) sebesar 85,11 % dan pada tahun 2009 angka melek huruf (AMH) sebesar 87,25 terjadi peningkatan. Pada tahun 2010 angka melek huruf (AMH) sebesar 88,50 % nilai ini lebih besar dari tahun 2008-2009. Pada tahun 2011 angka melek huruf (AMH) sebesar 89,88 % sedangkan pada tahun 2012 angka melek huruf (AMH) sebesar turun menjadi 89,78 %. Penurunan 0,10% ini disebabkan karena adanya perubahan kurikulum dalam program pendidikan di Indonesia. Sehingga masyarakat banyak yang menunggu kepastian dari pemerintah. Pada tahun 2013 angka melek huruf (AMH) sebesar 90,99 dan pada tahun 2014 dan tahun 2015 secara berurutan angka melek huruf (AMH) sebesar 91,37% dan 93,14%.

b. Kemiskinan

Dari tabel D.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut mengenai kemiskinan pada tahun 2008 persentasi kemiskinan sebesar 0,35 % dan pada tahun 2009 persentasi kemiskinan sebesar 0,32% dimana pada tahun 2009 program pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan telah berjalan dengan baik salah satunya. Yaitu KB (Keluarga Berencana) dan BOS (Bantuan

Oprasional Sekolah). Pada tahun 2010 persentasi kemiskinan sebesar 0,31% hal ini disebabkan karena program pemerintah yang masih terus berjalan untuk pengentasan kemiskinan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 persentasi kemiskinan sama sebesar 0,36%. Inilah yang menjadikan indikator besar program pemerintah bisa berjalan dengan baik, meskipun beberapa permasalahan yang harus diatasi. Pada tahun 2014-2015 persentasi kemiskinan sama sebesar 0,37% yang menindikasikan bahwa perekonomian yang tetap stabil yang mengakibatkan persentasi ekonomi tetap.

Dari tabel diatas dapat diolah dengan menggunakan SPSS 20 dapat di ketahui sebagai berikut:

Tabel 2.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 ^a	.357	.250	.01964
a. Predictors: (Constant), AMH				

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan R yaitu 0,597. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori kuat. Melalui tabel ini juga di peroleh nilai R Square atas koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk

oleh interaksi varabel bebas dan variabel terikat. Nilai AMH (Angka Melek Huruf) yang diperoleh adalah 35,7% memiliki pengaruh kontribusi sebesar 35,7% terhadap variabel Y yaitu kemiskinan dan 64,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar varabel AMH (Angka Melek Huruf) (X).

Tabel 3.

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	,001	1	,001	3,33	,118 ^b
	Residual	,002	6	,000		
	Total	,004	7			
a. Dependent Variable: Kemiskinan						
b. Predictors: (Constant), AMH						

Berdasarkan tabel Anova, diperoleh nilai Sig. = 0,118 yang berarti > kriteria signifikan 0,05 (5%), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan artinya model regresi linier tidak memenuhi kriteria linieritas.

Tabel 3.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-,131	,264	-,496	,637
	AMH	,005	,003	,597	,118
a. Dependent Variable: Kemiskinan					

a. Dependent Variable:

Kemiskinan

Dari persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel diperoleh model persamaan regresi: $Y = -0,131 + 0,005X_1$

b. Setiap kenaikan 1 satuan variabel Angka Melek Huruf X1 maka akan menurunkan nilai variabel y sebesar 0,005 satuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

a. Besarnya nilai korelasi / hubungan R yaitu 0,597. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori kuat. Melalui tabel ini juga di peroleh nilai R Square atas koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi varabel bebas dan variabel terikat. Nilai AMH (Angka Melek Huruf) yang diperoleh adalah 35,7% memiliki pengaruh kontribusi sebesar 35,7% terhadap variabel Y yaitu kemiskinan dan 64,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar varabel AMH (Angka Melek Huruf) (X).

b. Berdasarkan tabel Anova, diperoleh nilai Sig. = 0,118 yang berarti > kriteria signifikan 0,05 (5%), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data

penelitian adalah tidak signifikan artinya model regresi linier tidak memenuhi kriteria linieritas.

Saran

- a. Adanya kewajiban yang besar bagi pemerintah provinsi Jawa timur untuk meningkatkan Angka Melek Huruf dengan cara melaksanakan program-program pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bidang pendidikan.
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus dapat menurunkan Kemiskinan secara berkala, karena dengan menurunnya kemiskinan maka akan dapat mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya dan hukum-keamanan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuntjoro Jakti, Dorojatun, 2003. *Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Lipsey, Richard G dkk, 1991. *Pengantar Makro Ekonomi*. Edisi kedelapan, Jakarta: Erlangga.
- Noerdhus dan samuelson, 2000. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Rosyidi, Suherman. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwoko, 2005. *Dasar-Dasar ekonometrika*. Yogyakarta: Andi.
- Sukirno, Sadono. 1981. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Bima Grafika
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Bima Grafika.
- Suparmoko. 1996. *Pengantar Ekonometrika Makro*. Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFY- Yogyakarta.
- Santoso, A. 2000. *Buku Latihan SPSS Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Computindo.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.
- Tarmidi, T Lepi. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Husaini. 2008. *Buku Latihan SPSS Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Computindo.
- www.BPS.com
- www.Wikipedia.com